

Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah 2017-2024

Alifah Nurul Hikmafudien Fadlianti

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: alifah.22132@mhs.unesa.ac.id

Risqi Noor Hidayati Putri

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: risqiputri@unesa.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi sering digunakan sebagai tolok ukur utama dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan daerah, yang dalam praktiknya sangat berkaitan dengan kebijakan fiskal pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dan belanja modal memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017 hingga 2024. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan analisis regresi data panel melalui Fixed Effect Model (FEM), mencakup 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa PAD dan TKDD terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan, sementara belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan namun berarah negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara bersamaan, PAD, TKDD, dan belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Koefisien determinasi senilai 97,95% menegaskan bahwa PAD, TKDD, dan belanja modal memberikan kontribusi signifikan dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi, dengan faktor lain di luar model penelitian dijelaskan oleh sisanya yaitu 2,05%. Hasil ini menunjukkan bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut secara signifikan.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi

JEL: R11, H71, H72

Abstract

Economic growth is often used as the main benchmark in evaluating the success of regional development, which in practice is closely related to government fiscal policy. This study aims to examine the extent to which Local Own-Source Revenue (PAD), Transfers to Regions and Village Funds (TKDD), and capital expenditure affect economic growth in Central Sulawesi Province from 2017 to 2024. The approach used is a quantitative method with panel data regression analysis through the Fixed Effect Model (FEM), covering 13 regencies/cities in Central Sulawesi. The partial test results show that PAD and TKDD have a positive and significant effect, while capital expenditure has a significant but negative effect on economic growth. Simultaneously, PAD, TKDD, and capital expenditure have a significant effect on economic growth. The coefficient of determination of 97.95% confirms that PAD, TKDD, and capital expenditure contribute significantly to explaining the variation in economic growth, with other factors outside the research model explained by the remaining 2.05%. These results

How to cite: Fadlianti, A, N, H & Putri, R, N, H. (2026). Pengaruh Pendapatan dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah 2017-2024. *Independent : Journal Of Economics*, 6(2), 1–27.

indicate that the dynamics of regional economic growth are significantly influenced by these three variables.

Keywords: *Local Own-Source Revenue, Transfers to Regions and Village Funds, Capital Expenditure, Economic Growth*

JEL: *R11, H71, H72*

PENDAHULUAN

Salah satu tolok ukur dasar yang digunakan dalam menilai kinerja pembangunan suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan akumulasi nilai tambah yang diciptakan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah sebagai indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi daerah (Nurlaili, 2022). Peningkatan PDRB yang stabil dan berkelanjutan menunjukkan adanya peningkatan kuota produksi barang dan jasa, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pemerintah Indonesia berusaha memperkuat desentralisasi fiskal dengan memberikan pemerintah daerah kewenangan untuk mengendalikan pendapatan dan pengeluarannya sendiri guna membiayai pembangunan daerah dan urusan pemerintahan. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, pemerataan, dan proyek pembangunan prioritas di seluruh daerah (Deslina, 2024). Pertumbuhan ekonomi akan didorong melalui manajemen keuangan daerah yang ekonomis, efektif, dan efisien dengan menganut nilai *value for money*, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan (Saputra et al., 2021). Pertumbuhan ekonomi bukan hanya ditentukan oleh besarnya nominal yang diterima suatu daerah, namun juga ditentukan oleh bagaimana penerimaan tersebut dapat dialokasikan melalui belanja yang tepat sasaran, efisien, dan sesuai prioritas pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diartikan sebagai seluruh pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber ekonomi lokal, seperti pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, serta penerimaan sah lainnya yang menjadi hak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut UU HKPD. PAD mencerminkan hasil dari kegiatan ekonomi daerah yang dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan komponen utama berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari kekayaan daerah yang dikelola secara terpisah, dan pendapatan sah lainnya (Bernardin, Agustin, & Fitria, 2023). Dalam rangka membantu pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan potensi dan kekayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut, Kurniawati dan Muzdalifah (2022) mendefinisikan PAD sebagai pendapatan yang bersumber dari potensi lokal daerah serta dipungut berdasarkan ketentuan dan regulasi daerah yang berlaku.

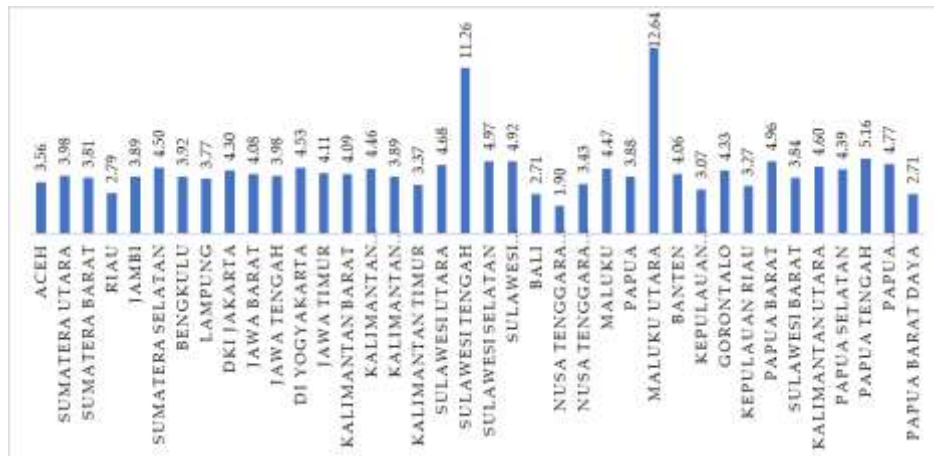
Secara teoritis, peningkatan PAD akan memperluas kapasitas fiskal pemerintah daerah guna membiayai pengeluaran untuk pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas ekonomi. Berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa alokasi PAD untuk pengeluaran produktif dapat memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Misalnya, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Provinsi Banten,

pendapatan daerah bersama dengan belanja modal berperan penting dalam memperkuat kinerja keuangan daerah, yang selanjutnya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Zein et al., 2024). Namun, kualitas manajemen dan kemampuan administrasi daerah yang memadai memengaruhi seberapa baik PAD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi selain dari pendapatan itu sendiri (Fauji & Syafitri, 2024).

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) termasuk dalam komponen belanja negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta pembangunan desa. Untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tanggung jawabnya, dana ini diberikan kepada daerah. Dana TKDD terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, Dana Keistimewaan, dan Dana Otonomi Khusus (Otsus). TKDD dijadikan sebagai instrumen utama dalam menjaga kapasitas fiskal daerah bagi daerah yang memiliki PAD terbatas. Hal ini menguatkan temuan Tana et al. (2024), yang menemukan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama pandemi COVID-19 banyak mengandalkan transfer dari pusat. TKDD mempengaruhi alokasi belanja, termasuk belanja modal dan sosial. Selain itu, menurut Yuliana et al. (2025), transfer dana ke daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi selama pandemi, meskipun kontribusinya masih dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi sosial, kapasitas pemerintah, dan infrastruktur daerah. Oleh karena itu, TKDD juga berfungsi sebagai stimulus untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan jaring pengaman fiskal ketika PAD tidak mencukupi. Transfer yang dialokasikan secara efektif dapat meningkatkan output daerah melalui belanja publik yang produktif sehingga memicu aktivitas ekonomi dan mempercepat pemulihan pasca-krisis.

Pengeluaran anggaran untuk pembelian atau penambahan aset, termasuk aset tetap maupun aset lainnya, disebut sebagai belanja modal. Ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Diharapkan bahwa aset-aset ini akan menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan, dengan masa manfaat melebihi satu tahun atau satu siklus akuntansi dan bernilai di atas ambang batas kapitalisasi aset minimum yang telah ditetapkan. Dari perspektif teori Keynesian, pengeluaran pemerintah, termasuk belanja modal, dianggap sebagai unsur penting dalam mendorong permintaan agregat. Melalui konsep *multiplier effect*, pengeluaran modal diyakini memiliki efek berantai pada ekonomi. Jika pemerintah meningkatkan pengeluaran pada sektor produktif, maka akan berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat, yang nantinya dapat mendorong konsumsi dan investasi. Putra et al. (2024) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang diperuntukkan untuk investasi aset tetap, seperti pembangunan jembatan, jalan, dan berbagai fasilitas publik lainnya disebut belanja modal. Komponen ini memiliki peran penting dalam anggaran daerah karena pembangunan infrastruktur tidak hanya mendorong peningkatan produktivitas ekonomi, namun berkontribusi pula pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Zein et al. (2024) menyatakan bahwa pengeluaran modal, yang mencakup investasi dalam infrastruktur, layanan publik, dan proyek pengembangan masyarakat, merupakan landasan pertumbuhan ekonomi, yang berdampak pada produktivitas, lapangan kerja, dan

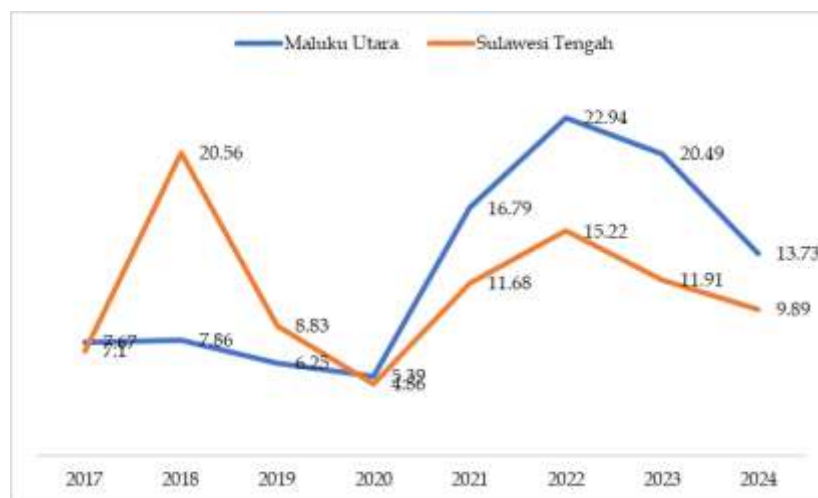
kesejahteraan sosial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, pendapatan masyarakat dapat meningkat.



Sumber: BPS (telah diolah), 2025

Gambar 1. Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2017-2024 (Persen)

Data perkembangan ekonomi beberapa provinsi di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan. Gambar 1 memperlihatkan bahwa hanya beberapa wilayah seperti Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang tumbuh lebih tinggi dengan persentase di atas 10 persen, sedangkan sebagian besar provinsi lain hanya tumbuh pada kisaran 3–5 persen (BPS, 2024). Namun, tren pertumbuhan kedua provinsi tersebut justru menunjukkan perlambatan dan fluktuasi yang cukup tajam dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi di beberapa periode sebelumnya belum sepenuhnya berkelanjutan.

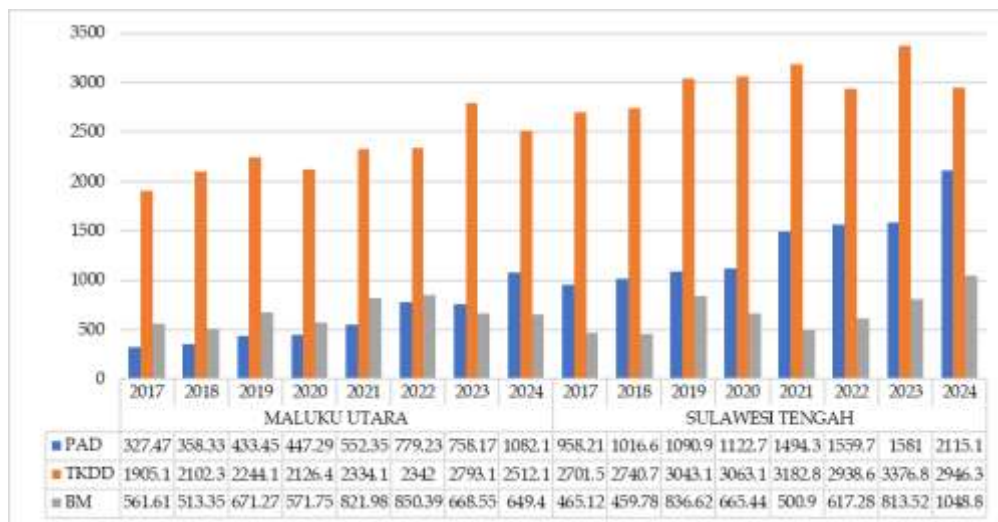


Sumber: BPS (telah diolah), 2025

Gambar 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara dan Sulawesi Tengah Tahun 2017-2024 (Persen)

Gambar 2 menggambarkan dinamika pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dan Sulawesi Tengah selama periode 2017–2024. Meskipun Maluku Utara menempati posisi pertama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi, tren pertumbuhannya cenderung menurun dari waktu ke waktu, yang mengindikasikan adanya pelemahan kinerja ekonomi daerah..

Di sisi lain, Sulawesi Tengah berada pada peringkat kedua dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang juga tinggi, namun menunjukkan pola yang serupa, yaitu cenderung menurun dan berfluktuasi. Lonjakan pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2018 hingga mencapai 20,56 persen diikuti oleh penurunan tajam pada periode 2019–2020. Walaupun sempat mengalami pemulihan pada tahun 2021–2022, pertumbuhan kembali melambat pada 2023–2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah masih bersifat fluktuatif dan rentan terhadap berbagai tekanan, baik dari faktor internal maupun eksternal.



Gambar 3. Realisasi PAD, TKDD, dan Belanja Modal Maluku Utara dan Sulawesi Tengah Tahun 2017-2024 (Miliar Rupiah)

Gambar 3 memperlihatkan perkembangan PAD, TKDD, dan belanja modal di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah selama periode 2017–2024. Di Maluku Utara, realisasi belanja modal cenderung menurun. Kondisi ini sejalan dengan teori, dimana penurunan belanja modal dapat mengurangi kapasitas produksi, memperlambat pembangunan infrastruktur, serta menekan aktivitas ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi turut melambat. Dengan demikian, korelasi antara menurunnya belanja modal dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara selaras dengan teori.

Sebaliknya, Sulawesi Tengah menunjukkan pola yang tidak sepenuhnya sejalan dengan teori. Meskipun PAD, TKDD, dan belanja modal cenderung meningkat, peningkatan kapasitas fiskal tersebut tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonomi sebagaimana terlihat pada Gambar 2. Fenomena ini mengindikasikan adanya potensi inefisiensi fiskal (*fiscal inefficiency*), di mana peningkatan kapasitas fiskal daerah belum sepenuhnya mampu terkonversi menjadi aktivitas ekonomi produktif yang mendorong pertumbuhan secara merata di kabupaten/kota Sulawesi Tengah. Ini

menandakan bahwa peningkatan PAD, TKDD, dan belanja modal belum optimal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Ketidakseimbangan antara peningkatan kapasitas fiskal dan kinerja pertumbuhan ekonomi berpotensi memperlebar ketimpangan regional di dalam suatu provinsi. Daerah dengan struktur ekonomi yang lebih kuat dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien cenderung dapat tumbuh lebih tinggi, sementara daerah yang bergantung pada transfer fiskal dan mengalokasikan belanja modal pada aset yang kurang produktif cenderung tertinggal. Situasi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi provinsi menjadi fluktuatif dan tidak merata, dengan hanya beberapa kabupaten/kota yang berperan sebagai motor utama perekonomian, sementara wilayah lain mengalami stagnasi.

Desentralisasi fiskal, sebagaimana didefinisikan oleh UU HKPD, adalah alih kewenangan fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah guna membiayai pembangunan serta pelaksanaan tugas di daerah. Oates (1972) dalam karyanya yang berjudul "*Fiscal Federalism*" menjelaskan bahwa pemerintah daerah dinilai lebih paham akan kebutuhan masyarakatnya, sehingga pelaksanaan layanan publik dan pembangunan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Pelimpahan kewenangan tersebut mencerminkan praktik desentralisasi fiskal, terutama dalam pengelolaan belanja daerah, penggalian pendapatan lokal daerah, serta pengalokasian dana dari pemerintah pusat. Maka dari itu, implementasi desentralisasi fiskal dapat tercermin dari dinamika pada sisi PAD, transfer ke daerah, dan belanja (Aditya et al., 2024).

Dalam kerangka teori desentralisasi fiskal, PAD dan TKDD adalah dua sumber utama pendapatan daerah. PAD menunjukkan kemandirian fiskal daerah, sedangkan TKDD memberikan dukungan fiskal dari pemerintah pusat untuk meratakan pembangunan di seluruh daerah. Dua filosofi utama yang menjadi inti dari desentralisasi fiskal: pemerataan, yaitu tugas pemerintah pusat untuk mengurangi ketimpangan antardaerah, dan kemandirian, yaitu kemampuan daerah untuk membiayai pelayanan publiknya secara mandiri sesuai dengan kewenangan yang dimiliki (Ariyanti, 2023). Sulaeman & Silvia (2019) menyatakan bahwa untuk melaksanakan desentralisasi, PAD masih kurang memadai untuk mendanai semua keperluan daerah. Oleh sebabnya, pemerintah daerah memerlukan dukungan dari pemerintah pusat melalui penyaluran dana transfer ke berbagai daerah. Menurut Putra et al. (2024), TKDD meliputi dana-dana yang didistribusikan dari pemerintah pusat atau provinsi ke pemerintah daerah, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Transfer ini penting untuk mendukung berbagai proyek dan program yang dapat meningkatkan infrastruktur serta mendukung layanan publik, yang nantinya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional.

Dari sisi belanja, Keynes menitikberatkan pentingnya pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan permintaan agregat sehingga memicu pertumbuhan ekonomi. Pada karyanya "*The General Theory of Employment, Interest, and Money*" (1936), Keynes menjelaskan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah dapat memberikan efek multiplier, di mana peningkatan pengeluaran awal akan diikuti oleh peningkatan pendapatan dan konsumsi masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, belanja modal

sebagai bentuk pengeluaran pemerintah yang berfungsi sebagai stimulus ekonomi. Belanja modal dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa, memperluas peluang kerja, serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Belanja modal juga berperan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik. Investasi pada aset tetap, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum, mampu memperlancar mobilitas, menurunkan biaya distribusi, meningkatkan daya tarik investasi, dan menciptakan kesempatan kerja baru. Putra et al. (2024) menyatakan bahwa belanja modal menjadi komponen penting pada anggaran daerah karena mampu meningkatkan produktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat melalui investasi pada infrastruktur. Menurut Haryati et al. (2025) belanja modal dianggap sebagai alat kebijakan penting dalam pengelolaan fiskal daerah karena dapat meningkatkan kapasitas produksi regional, memperkuat jaringan koneksi antardaerah, dan memicu efek ganda (*multiplier effect*) terhadap kegiatan ekonomi masyarakat lokal. Belanja modal yang efektif memperkuat fondasi ekonomi lokal menuju pertumbuhan yang lebih inklusif. Selain itu, Kirana & Susilo (2024) menegaskan bahwa belanja modal memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan kualitas serta kuantitas infrastruktur publik, yang akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Efektifitas dan efisiensi belanja modal berpotensi meningkatkan produktivitas, inovasi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, belanja modal dalam penelitian ini dianggap sebagai instrumen fiskal yang berperan dalam merangsang pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat sehingga menimbulkan efek pengganda dalam perekonomian.

Pertumbuhan ekonomi daerah tidak lepas dari peran kebijakan fiskal pemerintah dalam mengelola sumber daya dan mengalokasikan anggaran untuk mendukung aktivitas ekonomi. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pengelolaan keuangan daerah berperan penting karena pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Desentralisasi fiskal Oates memberikan kapasitas dan kewenangan bagi pemerintah daerah Sulawesi Tengah untuk mengelola PAD, menerima TKDD, dan menentukan belanja sesuai kebutuhan daerah. Kemudian, menurut Keynes, ketika kapasitas fiskal tersebut dialokasikan menjadi pengeluaran pemerintah yang produktif, pengeluaran tersebut dapat menciptakan *multiplier effect* melalui peningkatan permintaan, pendapatan, konsumsi, produksi, dan kesempatan kerja.

Pada konteks Provinsi Sulawesi Tengah, PAD, TKDD, dan belanja modal berperan strategis sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mempercepat proses pembangunan daerah. Namun, data menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara peningkatan penerimaan dan pengeluaran daerah dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi, di mana kenaikan kapasitas fiskal belum sepenuhnya diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang sepadan. Selain itu, perbedaan laju pertumbuhan antar kabupaten/kota mengindikasikan bahwa manfaat pembangunan masih belum terdistribusi secara merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa sasaran utama desentralisasi fiskal, yakni terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, masih belum tercapai secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar kontribusi PAD, TKDD, dan belanja modal terhadap

pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah selama 2017 hingga 2024. Ada empat hipotesis dari penelitian ini, yaitu:

H1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sulawesi Tengah tahun 2017-2024.

H2 = Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sulawesi Tengah tahun 2017-2024.

H3 = Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sulawesi Tengah tahun 2017-2024.

H⁴ = PAD, TKDD, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sulawesi Tengah tahun 2017-2024.

Harapan penulis, temuan penelitian ini dapat memperkaya wawasan, memperluas pemahaman konseptual dan empiris tentang permasalahan yang diteliti serta dapat dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan fiskal daerah yang lebih adil, berkelanjutan, dan efektif.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif, dimana hubungan variabel dengan obyek penelitian bersifat eksplanatori, sehingga terdapat variabel independen dan dependen. Untuk mengetahui seberapa besar variabel independen memengaruhi variabel dependen, hubungan ini dianalisis (Sugiyono, 2023). Penelitian kuantitatif ini berfokus pada analisis bagaimana PAD, TKDD, dan belanja modal memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Menurut Sugiyono (2023), penelitian kuantitatif ialah suatu teknik yang menerapkan analisis statistik dan pengolahan data numerik untuk menguji hipotesis yang telah disusun. Dampak PAD, TKDD dan belanja modal pada pertumbuhan ekonomi dapat dianalisis dengan objektif, terstruktur, dan sistematis menggunakan pendekatan ini.

Jenis dan Sumber Data

Data panel yang mengintegrasikan dimensi waktu dan unit daerah, yaitu tiga belas kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah dari tahun 2017 sampai 2024 diterapkan pada penelitian ini. Pendekatan data panel dipilih untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terkait bagaimana PAD, TKDD, dan belanja modal memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Analisis didasarkan pada data sekunder yang dihimpun dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Lokasi Penelitian

Seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah dengan total 13 kabupaten dan kota dijadikan sebagai wilayah observasi. Fokus analisis pada daerah-daerah tersebut bertujuan agar penelitian dapat berkontribusi dalam mengembangkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang kondisi fiskal dan ekonomi di setiap daerah.

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan PAD, TKDD, dan belanja modal sebagai variabel independen, sedangkan PDRB adalah variabel dependen. PAD ialah pendapatan yang dihasilkan dari pajak, retribusi, kekayaan daerah yang dikelola secara terpisah, serta sumber pendapatan sah lainnya. Indikator yang digunakan berupa realisasi PAD dalam miliar rupiah berdasarkan laporan realisasi APBD dari DJPK. TKDD merupakan dana transfer dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah, diukur berdasarkan realisasi TKDD dalam miliar rupiah dari laporan realisasi TKDD DJPK. Belanja modal ialah belanja untuk membeli atau menambah aset tetap yang bermanfaat lebih dari satu tahun anggaran, dengan indikator realisasi belanja modal dalam satuan miliar rupiah yang juga bersumber dari laporan realisasi APBD DJPK. Seluruh nilai tambah dari produk dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu direpresentasikan oleh PDRB, yang dihitung menggunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dalam satuan miliar rupiah, yang diambil dari BPS Sulawesi Tengah.

Teknik Pengumpulan Data

Penghimpunan data dengan metode dokumentasi, yang meliputi kegiatan mengakses, mencatat, mengutip, mengumpulkan, dan mengolah data sekunder. Data sekunder tersebut diambil dari instansi publik, khususnya Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), yang menyediakan data resmi dan terpercaya untuk mendukung analisis penelitian. Berbagai penelitian terdahulu dan literatur yang relevan juga turut dimanfaatkan sebagai referensi pendukung guna memperkuat hasil analisis penelitian. Data sekunder yang digunakan, telah tersedia, tersusun secara sistematis, dan tercatat dengan baik sehingga dapat menjamin tingkat kredibilitas serta keakuratan data. Penggunaan metode dokumentasi juga mampu menghemat waktu penelitian karena data yang diperlukan telah tersedia dan mudah diakses. Oleh karena itu, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan akurat, valid, dan dapat dipercaya.

Teknik Analisis Data

Dengan bantuan EViews versi 12 untuk pengolahan data, penelitian ini memanfaatkan metode analisis regresi data panel dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$PDRB_{it} = \alpha + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 TKDD_{it} + \beta_3 BM_{it} + \epsilon_{it} \quad (1)$$

Keterangan:

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (Pertumbuhan Ekonomi)

PAD : Pendapatan Asli Daerah

TKDD : Transfer ke Daerah dan Dana Desa

BM : Belanja Modal

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

i : Subjek (kabupaten/kota di Sulawesi Tengah)

t : Periode waktu t (2017-2024)

ϵ : Error/residual

Uji Pemilihan Model

Menurut Gujarati dan Porter (2009), analisis data panel umumnya menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, *Pooled Ordinary Least Squares (OLS)* atau *Common Effect Model (CEM)*, yang menduga bahwa tidak adanya variasi perilaku antar individu dan antar waktu, sehingga semua data dianggap memiliki intersep yang sama. Kedua, *Fixed Effect Model (FEM)* yang menduga adanya karakteristik unik pada setiap unit individu yang bersifat tetap sepanjang periode penelitian. Ketiga, *Random Effect Model (REM)* yang menganggap variasi karakteristik antar individu bersifat acak dan menjadi bagian dari komponen kesalahan dalam model regresi. Untuk memilih model yang terbaik, beberapa tahap pengujian harus dilakukan, diantaranya:

Uji Chow

Salah satu teknik untuk membandingkan CEM dan FEM adalah melalui uji Chow. Hipotesis dasar dari uji ini adalah:

H_0 : CEM terbaik

H_1 : FEM terbaik

Penentuan model dilakukan berdasarkan nilai probabilitas hasil pengujian, ketika probabilitas kurang dari 0,05, model FEM terpilih sebagai model terbaik dan H_0 ditolak. Di sisi lain, H_0 diterima dan CEM dianggap sebagai pilihan yang lebih baik untuk analisis jika nilai probabilitas lebih dari 0,05.

Uji Hausman

Membandingkan kelayakan penggunaan FEM dan REM adalah tujuan dari uji Hausman. Hipotesis uji ini adalah:

H_0 : REM terbaik

H_1 : FEM terbaik

Penentuan model terbaik dilakukan berdasarkan nilai probabilitas hasil uji, di mana H_0 ditolak saat nilai probabilitas $< 0,05$, artinya FEM menjadi model terbaik. Di sisi lain, H_0 diterima dan model REM dianggap lebih cocok digunakan dalam penelitian saat nilai probabilitas $> 0,05$.

Uji Lagrange Multiplier (LM)

Membandingkan kelayakan model CEM dan REM adalah tujuan dari uji Lagrange Multiplier (LM). Hipotesis dasar dari uji ini adalah:

H_0 : CEM terbaik

H_1 : REM terbaik

Keputusan diambil berdasarkan nilai probabilitas hasil pengujian, di mana H_0 ditolak saat nilai probabilitas tidak melebihi 0,05, artinya REM dinyatakan lebih sesuai. Sementara, H_0 diterima ketika nilai probabilitas melebihi 0,05, sehingga CEM dianggap lebih layak diterapkan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Untuk memastikan kemungkinan terdapat korelasi linier yang kuat antara variabel independen dalam model atau tidak, dilakukan uji multikolinearitas. Pengujian dilakukan dengan menggunakan matriks korelasi (*correlation matrix*) sebagai alat untuk mengukur tingkat keterkaitan antarvariabel bebas. Hipotesis dalam uji ini yaitu:

H_0 : model bebas dari multikolinearitas

H_1 : model tidak bebas dari multikolinearitas

Ukuran koefisien korelasi antar variabel independen berfungsi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Ketika nilai korelasi di bawah 0,8, H_0 diterima, dan model dikatakan bebas dari masalah multikolinearitas. Namun, H_0 ditolak dan model dianggap terpengaruh oleh multikolinearitas jika nilai korelasi melebihi 0,8.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dimaksudkan guna memastikan sifat varians residual dari model, apakah homogen atau heterogen. Ketika varians residual bervariasi dari satu periode ke periode lainnya, ini dikenal sebagai heteroskedastisitas. Pengujian diterapkan menggunakan metode Glejser, dengan hipotesis:

H_0 : heteroskedastisitas tidak terjadi dalam model

H_1 : heteroskedastisitas terjadi dalam model

Nilai probabilitas menjadi tolok ukur pengambilan keputusan, ketika lebih tinggi dari 0,05, H_0 diterima dan model dikatakan homogen. Namun, H_0 ditolak dan model dikatakan memiliki heteroskedastisitas saat nilai probabilitas lebih rendah dari 0,05.

Uji Signifikansi

Uji t (Uji Parsial)

Menemukan pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen yang dianalisis secara terpisah (parsial) adalah tujuan dari uji t, yang sering disebut sebagai uji parsial dalam model regresi. Menurut Gujarati dan Porter (2009), tingkat signifikansi dari koefisien regresi dihitung menggunakan *t-statistic* atau *p-value* untuk mengetahui apakah setiap variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis alternatif (H_1) menduga bahwa variabel independen ke-*i* secara signifikan memengaruhi variabel dependen, sementara hipotesis nol (H_0) menduga bahwa variabel independen ke-*i* tidak memiliki pengaruh signifikan pada variabel dependen. Penentuan hasil uji menggunakan nilai probabilitas, yang juga dikenal sebagai *p-value*. H_0 ditolak ketika *p-value* < 0,05, mencerminkan bahwa variabel independen memiliki dampak yang signifikan. Sebaliknya, ketika *p-value* > 0,05, H_0 diterima dan variabel independen diduga tidak berpengaruh signifikan.

Uji F (Uji Simultan)

Untuk menentukan apakah variabel independen dalam suatu model secara bersamaan menjelaskan perubahan pada variabel dependen, digunakan uji F. Variabel independen secara bersama-sama diduga tidak berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen menurut hipotesis nol (H_0). Sebaliknya, hipotesis alternatif (H_1) menduga bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen ketika diuji secara bersamaan. *P-value* digunakan untuk membuat keputusan, saat *p-value* di bawah 0,05, H_0 ditolak dan saat di atas 0,05, H_0 diterima.

Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam model regresi, R^2 adalah metrik yang dipakai guna menilai efektivitas variabel independen saat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. R^2 berkisar di angka 0 dan 1, di mana nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen lebih mampu menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Namun, nilai R^2 yang tinggi tidak selalu menjamin bahwa model regresi tepat atau optimal, karena R^2 tidak dapat mendeteksi kesalahan spesifikasi model atau pelanggaran asumsi klasik. Dengan demikian, pengujian asumsi klasik dan pengujian signifikansi statistik lainnya perlu dilakukan untuk menjamin validitas model (Gujarati & Porter, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Gambar 4 menunjukkan realisasi PAD kota dan kabupaten di Sulawesi Tengah dari 2017 hingga 2024 yang cenderung mengalami fluktuasi dengan tren meningkat. Kabupaten Morowali mencatat PAD tertinggi dengan pertumbuhan yang signifikan. Realisasi PAD Kabupaten Morowali mencapai Rp 1.049,9 miliar pada tahun 2024. Sedangkan daerah kepulauan seperti Kabupaten Banggai Laut memiliki PAD relatif rendah, hanya berada di kisaran Rp 21-40 miliar dari tahun 2017-2024. Perbedaan ini mencerminkan variasi struktur ekonomi, potensi pendapatan, serta kemampuan mengolah sumber pendapatan daerah. Secara umum, ketimpangan PAD menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas fiskal yang berdampak pada kemampuan daerah dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara Gambar 5 menunjukkan bahwa realisasi TKDD dari 2017 hingga 2024 memiliki pola yang relatif stabil, namun tetap berfluktuasi dari waktu ke waktu dan perbedaan yang signifikan antar daerah. Kabupaten Banggai menerima alokasi terbesar mencapai Rp 2.655 miliar di tahun 2023, sementara Kabupaten Banggai Laut menerima alokasi lebih kecil, hanya berada di kisaran Rp 560 - Rp 666 miliar. Secara keseluruhan, TKDD masih menjadi penyumbang utama pendapatan daerah, khususnya bagi daerah yang memiliki PAD rendah. Perbedaan alokasi mencerminkan variasi kebutuhan fiskal, jumlah penduduk, serta karakteristik daerah, sehingga menunjukkan tingginya ketergantungan daerah pada dukungan fiskal pemerintah pusat.

Gambar 6 memperlihatkan adanya ketidakstabilan realisasi belanja modal tahun 2017-2024. Kabupaten Banggai mencatat realisasi belanja modal tertinggi yang mencapai Rp 671,1 miliar di tahun 2024, sementara daerah seperti Kabupaten Banggai Laut relatif lebih rendah, berada di kisaran Rp 46 – Rp 238 miliar selama 2017-2024. Perbedaan ini mencerminkan variasi kapasitas fiskal, prioritas pembangunan, serta kebutuhan infrastruktur di masing-masing wilayah. Secara umum, fluktuasi belanja modal menunjukkan bahwa alokasi investasi pemerintah daerah masih dipengaruhi oleh kondisi fiskal dan agenda pembangunan daerah yang berbeda.

Data yang dirilis BPS Provinsi Sulawesi Tengah yang ditunjukkan pada Gambar 7, menggambarkan bahwa perkembangan PDRB dari 2017 hingga 2024 masih memperlihatkan ketimpangan ekonomi yang cukup tinggi antar daerah. Dalam periode tersebut, Kabupaten Morowali menjadi daerah dengan tingkat PDRB paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya dan tumbuh paling pesat yaitu mencapai Rp 98.808,77 miliar di tahun 2024, didorong oleh perkembangan industri pengolahan berbasis nikel. Sebaliknya, daerah kepulauan seperti Kabupaten Banggai Laut memiliki PDRB relatif rendah yang hanya berada di kisaran Rp 1.542 – Rp 1.877 miliar dari tahun 2017-2024. Meskipun PDRB sebagian besar daerah meningkat dari tahun ke tahun, ketimpangan antar daerah masih signifikan. Kondisi ini menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan agar pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah lebih inklusif dan merata.

Pemilihan Model Estimasi

Tabel 1. Hasil Uji Pemilihan Model

Metode	Prob
Uji Chow	0.0000
Uji Hausman	0.0000

Sumber: Hasil Output E-Views 12 (telah diolah), 2025

Nilai probabilitas yang diperoleh dari hasil uji Chow senilai $0,0000 < 0,05$. Maka FEM dianggap cocok untuk digunakan karena H_0 ditolak dan H_1 diterima. Selain itu, nilai probabilitas dari uji Hausman senilai $0,0000 < 0,05$ sehingga FEM lebih unggul dibandingkan REM karena H_0 ditolak dan H_1 diterima. Uji Lagrange Multiplier tidak diperlukan karena hasil kedua uji tersebut konsisten, yang menegaskan bahwa model FEM adalah model terbaik yang sesuai untuk estimasi.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

	LNPAD	LNTKDD	LNBM
LNPAD	1.000000	0.651936	0.614010
LNTKDD	0.651936	1.000000	0.551485
LNBM	0.614010	0.551485	1.000000

Sumber: Hasil Output E-Views 12 (telah diolah), 2025

Uji multikolinearitas dilakukan dengan *correlation matriks*. Hasilnya yaitu nilai korelasi antar variabel independen $< 0,8$, di mana korelasi antara PAD dan TKDD yaitu 0,6519, PAD dan belanja modal sebesar 0,6140, serta TKDD dan belanja modal sebesar 0,5515. Dengan demikian, H_0 diterima sehingga model regresi terhindar dari masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNPAD	-0.030816	0.0416	-0.7407	0.4608
LNTKDD	-0.007347	0.1077	-0.0682	0.9458
LNBM	0.022920	0.0340	0.6740	0.5021

Sumber: Hasil Output E-Views 12 (telah diolah), 2025

Uji heteroskedastisitas diterapkan melalui metode Glejser, dengan hasil nilai probabilitas semua variabel independen melebihi 0,05, yaitu PAD sebesar 0,4608, TKDD sebesar 0,9458, serta belanja modal sebesar 0,5021. Maka dari itu, H_0 diterima, yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, sehingga varians residual bersifat homogen (homoskedastis) dan model regresi layak digunakan. Terpenuhinya serangkaian uji asumsi klasik mencerminkan model regresi yang diterapkan sudah valid dan tidak bias.

Hasil Estimasi Regresi

Ketiga variabel independen pada penelitian ini terbukti secara signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dalam Tabel 4. Dalam penelitian ini, transformasi logaritma natural (LN) diterapkan guna meminimalisir fluktuasi data dan menstabilkan varians, sehingga hasil estimasi menjadi lebih reliabel. Berikut adalah model persamaan yang diturunkan dari hasil regresi menggunakan FEM pada regresi data panel.

$$LNPD_{it} = 1.778 + 0.345LN_{PAD_x0000_it} + 0.883LN_{TKDDit} - 0.104LN_{BMit} \quad (2)$$

Koefisien LNPAD (0.344861), koefisien positif mengasumsikan bahwa setiap kenaikan 1% PAD akan diikuti oleh peningkatan PDRB sebesar 0.344861%. Ini menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap PDRB karena aktivitas ekonomi meningkat seiring dengan PAD, yang pada akhirnya dapat meningkatkan PDRB.

Koefisien LNTKDD (0.882774), koefisien positif mengasumsikan bahwa setiap kenaikan 1% TKDD akan diikuti oleh peningkatan PDRB sebesar 0.882774%. TKDD merupakan variabel paling dominan, mengindikasikan bahwa transfer fiskal dari pemerintah pusat sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Koefisien LNBM (-0.104265), koefisien negatif mengasumsikan setiap naiknya 1% belanja modal akan diikuti oleh penurunan PDRB sebesar 0.104265%. Korelasi negatif belanja modal dengan PDRB menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya didorong oleh alokasi belanja modal selama periode pengamatan.

Hasil Uji Hipotesis

Uji t (Uji Parsial)

Probabilitas PAD senilai 0,0000 yang tidak lebih dari 0,05. Oleh karenanya, H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, PAD secara signifikan mempengaruhi PDRB secara parsial.

Probabilitas TKDD adalah 0,0000, yang kurang dari tingkat signifikansi 0,05, akibatnya H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang mengindikasikan bahwa TKDD secara signifikan mempengaruhi PDRB secara parsial.

Probabilitas belanja modal senilai 0,0448 yang kurang dari 0,05, maka pengaruh parsial yang signifikan dari belanja modal terhadap PDRB telah terbukti, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Uji F (Uji Simultan)

Tabel 4 memperlihatkan bahwa F statistik senilai 0,00000 di bawah 0,05, sehingga H_0 ditolak sedangkan H_1 diterima. Temuan ini mengindikasikan pengaruh simultan dari PAD, TKDD, dan belanja modal terhadap PDRB adalah signifikan.

Koefisien Determinasi (R-Squared)

R-squared pada Tabel 4 berada di angka 0,979502 (97,95%) mengindikasikan bahwa sebesar 97,95% variasi pada variabel PDRB mampu dijelaskan oleh variabel PAD, TKDD, serta belanja modal dalam model penelitian. Sementara itu, variabel yang tidak termasuk dalam model penelitian menjelaskan sekitar 2,05%. Variabel independen yang digunakan diperkirakan mampu menjelaskan perubahan PDRB dengan kuat dan relevan, dan model regresi yang digunakan memiliki kecocokan yang sangat baik karena nilai R-squared mendekati 1.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Tabel 4, koefisien PAD senilai 0,344861 dan probabilitas 0,0000. Probabilitas di bawah tingkat signifikansi 0,05 mencerminkan PAD secara signifikan dan positif memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Temuan ini konsisten dengan hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian bahwa PAD mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga hipotesis dapat diterima.

Temuan penelitian ini memperkuat pandangan dalam teori desentralisasi fiskal bahwa penguatan kapasitas fiskal daerah, khususnya melalui peningkatan PAD, dapat mendorong efisiensi dalam penyediaan layanan publik. Hal ini mengacu pada asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki kedekatan dan pemahaman yang lebih baik terhadap karakteristik serta kebutuhan masyarakat di wilayahnya, sehingga pengelolaan anggaran dapat dilakukan secara lebih efektif. Bertambahnya penerimaan daerah dari pajak dan sumber lainnya akan memperbesar ruang fiskal untuk pembiayaan pembangunan, yang selanjutnya mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Secara empiris, temuan ini selaras dengan temuan Aditya et al. (2024), Nurlaili (2022), serta Kurniawati dan Muzdalifah (2022) yang menunjukkan bahwa PAD berkontribusi signifikan dan berdampak positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Tingginya PAD meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan memberikan fleksibilitas dalam pengalokasian anggaran pembangunan, khususnya pada infrastruktur dan layanan umum, sehingga berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi daerah.

Meskipun laju kenaikannya berbeda-beda antar daerah, Gambar 4 menunjukkan bahwa realisasi PAD relatif meningkat dari 2017 hingga 2024. Tren ini mendukung hasil regresi, yang mencerminkan adanya dampak positif serta signifikan dari PAD

terhadap PDRB. Kondisi tersebut menekankan bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk mendorong kegiatan ekonomi produktif meningkat seiring dengan meningkatnya PAD yang diperoleh. Hasil ini menyoroti pentingnya optimalisasi sumber pendapatan daerah agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat secara berkelanjutan.

Pemerintah daerah harus mengoptimalkan PAD yang berasal dari aktivitas ekonomi yang telah berkembang di masing-masing daerah. Perlu adanya pembaruan basis data wajib pajak, digitalisasi pemungutan, dan pemantauan potensi pembayaran yang belum tertagih di masing-masing daerah. Kebijakan tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik ekonomi daerah, seperti penguatan nilai tambah, diversifikasi ekonomi, dan hilirisasi khususnya pada sektor pertambangan di Morowali dan Morowali Utara; pengembangan pengolahan hasil pertanian dan perikanan di daerah sentra produksi seperti Parigi Moutong, Poso, Tolitoli, dan Banggai; serta optimalisasi sektor pariwisata dan perikanan di wilayah kepulauan seperti Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Dengan demikian, peningkatan PAD tidak hanya memperbesar kapasitas fiskal, tetapi juga memperluas nilai tambah, kesempatan kerja, dan aktivitas ekonomi yang menjadi basis pertumbuhan daerah.

Pengaruh Transfer ke Daerah dan dana Desa (TKDD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dari Tabel 4, probabilitas TKDD bernilai 0,0000 yang kurang dari 0,05, dengan koefisien 0,882774. Artinya, variabel TKDD secara signifikan dan positif mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. TKDD memiliki koefisien regresi terbesar yang mencerminkan bahwa transfer fiskal dari pemerintah pusat berfungsi sebagai sarana strategis untuk mendukung kapasitas fiskal daerah. Temuan ini selaras dengan hipotesis bahwa TKDD mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sehingga hipotesis terbukti dan dapat diterima. Namun, besarnya dukungan fiskal pemerintah pusat juga menunjukkan betapa tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendanaan dari pemerintah pusat. Kondisi ini perlu diperhatikan karena ketergantungan yang berlebihan pada transfer dapat mengurangi insentif pemerintah daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan PAD. Oleh karena itu, peningkatan TKDD perlu didukung dengan penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan daerah sehingga desentralisasi fiskal tidak hanya memperkuat daya beli pemerintah daerah, tetapi juga mendorong kemampuan untuk membiayai pembangunan secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

Teori desentralisasi fiskal, yang berpendapat bahwa transfer antar pemerintah merupakan sarana untuk mengatasi ketimpangan anggaran daerah dan menjamin tersedianya sumber daya lokal yang cukup untuk menyediakan layanan publik, secara teoritis sejalan dengan hasil penelitian ini. Di Indonesia, TKDD berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, serta perluasan kesempatan kerja.

Hasil studi ini selaras dengan temuan Putra et al. (2024), yang menemukan bahwa TKDD secara signifikan dan positif memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, hasil ini bertolakbelakang dengan temuan Nurmala et al. (2025) yang

menunjukkan pengaruh negatif dana transfer, yang disebabkan oleh kurang optimalnya pengelolaan fiskal daerah, khususnya karena dominasi alokasi dana untuk pengeluaran rutin yang tidak berdampak langsung terhadap perekonomian. Rahman et al. (2022) juga menegaskan bahwa peningkatan dana transfer tidak secara otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa didukung tata kelola fiskal yang transparan dan akuntabel, sehingga kualitas pengelolaan menjadi faktor kunci efektivitasnya.

Dari Gambar 5, terlihat bahwa realisasi TKDD selama 2017–2024 relatif besar dan stabil, cenderung meningkat di beberapa wilayah. Pola ini memperkuat hasil regresi, yang memperlihatkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari TKDD terhadap PDRB Sulawesi Tengah, karena transfer fiskal pemerintah pusat berperan penting dalam menjaga keberlanjutan belanja publik dan stabilitas ekonomi daerah. Tingginya realisasi dan koefisien TKDD juga menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal daerah yang cukup besar, sehingga kualitas tata kelola menjadi faktor penentu dalam efektivitasnya. Oleh karena itu, meskipun TKDD telah terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi, dampaknya hanya akan optimal jika dikelola secara produktif, transparan, dan dialokasikan pada pengeluaran yang memiliki efek multiplier terhadap perekonomian.

TKDD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah dengan koefisien terbesar, sehingga menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan. Namun, dominannya peran TKDD menunjukkan perlunya penguatan kemandirian fiskal daerah melalui penganggaran berbasis kinerja dengan target *output* dan *outcome* yang terukur. Pemanfaatan TKDD perlu diprioritaskan pada program yang memiliki efek pengganda dan sesuai karakteristik wilayah masing-masing, seperti pada Morowali dan Morowali Utara, TKDD dapat digunakan untuk memperkuat infrastruktur pendukung industri sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan keterkaitan industri dengan UMKM lokal. Di daerah pertanian seperti Poso, Parigi Moutong, Sigi, Tolitoli, dan Buol, perlu adanya prioritas pada infrastruktur pertanian dan rantai nilai. Di wilayah kepulauan seperti Banggai Kepulauan dan Banggai Laut prioritas dapat diberikan pada konektivitas antarpulau dan infrastruktur pendukung perikanan serta pariwisata. Sementara itu, Kota Palu perlu mengoptimalkan TKDD untuk mendukung konektivitas perkotaan, pelayanan publik, perdagangan, jasa, dan industri. Evaluasi TKDD juga perlu diorientasikan pada capaian dan manfaat ekonomi, bukan sekadar penyerapan anggaran, sehingga TKDD mampu meningkatkan produktivitas, nilai tambah komoditas lokal, ketahanan ekonomi, dan secara bertahap mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dengan koefisien regresi sebesar -0,104265, Tabel 4 menunjukkan probabilitas belanja modal sebesar 0,0448, yang berada di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal memiliki dampak yang cukup besar namun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan analisis ini memberikan bukti empiris yang mendukung hipotesis bahwa belanja modal memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, meskipun pengaruhnya bersifat negatif, hipotesis yang disusun tetap terbukti dan diterima.

Secara teoritis, terdapat inkonsisten hasil temuan ini dengan teori Keynesian *multiplier effect*, dimana belanja modal seharusnya mampu memperbesar kapasitas

produksi dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui efek multiplier. Hasil ini konsisten dengan temuan Laodini et al. (2023), Simamora et al. (2024), dan Aditya et al. (2024) yang menyatakan adanya korelasi yang bersifat negatif antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Situasi ini mengindikasikan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan belanja modal di daerah, khususnya akibat ketidakefisienan alokasi, rendahnya investasi pada aset produktif, serta proyek infrastruktur yang kurang terintegrasi dengan sektor ekonomi utama.

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Provinsi Sulawesi Tengah pada Gambar 8 dan Gambar 9, realisasi belanja modal selama 2019–2024 didominasi oleh belanja jalan, irigasi dan jaringan serta gedung dan bangunan. Sementara itu, belanja peralatan dan mesin cenderung berfluktuasi, sedangkan belanja tanah dan aset tetap lainnya relatif kecil dan tidak berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa belanja modal Provinsi Sulawesi Tengah lebih banyak diarahkan pada pembangunan aset fisik yang manfaatnya bersifat jangka panjang (*time lag*), sehingga dampaknya terhadap peningkatan output regional belum sepenuhnya dapat dirasakan dalam periode pengamatan. Hal ini sejalan dengan hasil regresi penelitian yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, peningkatan realisasi belanja modal belum secara otomatis diikuti oleh peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari penelitian sebelumnya yang juga menguji tentang pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi, Sumatera Barat menunjukkan hasil yang relatif berbeda. Hasanah dan Anshari dalam penelitiannya terhadap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada periode 2018–2024 yang juga menggunakan pendekatan Fixed Effect Model menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Hasanah P.H, 2026). Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal di Sumatera Barat memiliki keterkaitan yang lebih produktif dengan peningkatan aktivitas ekonomi daerah dibandingkan dengan kondisi yang ditemukan di Sulawesi Tengah. Temuan ini juga diperkuat oleh penelitian Fifiyanti dan Maryati pada 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat periode 2011–2023 yang menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Fifiyanti Y, 2025).

Perbedaan ini mengindikasikan bahwa besarnya alokasi belanja modal belum dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan belanja daerah. Sumatera Barat dapat menjadi pembanding bahwa belanja modal yang diarahkan dan dimanfaatkan secara produktif memiliki potensi lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, di Sulawesi Tengah, meskipun belanja modal didominasi oleh pembangunan jalan, irigasi, jaringan, serta gedung dan bangunan, peningkatan belanja tersebut belum tercermin dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi selama periode penelitian. Oleh karena itu, peningkatan kualitas belanja modal di Sulawesi Tengah perlu diarahkan pada pembangunan aset yang memiliki keterkaitan langsung dengan sektor-sektor produktif, meningkatkan konektivitas dan kapasitas produksi daerah, serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Kualitas, ketepatan sasaran, dan manfaat yang dihasilkan merupakan faktor penting dalam efektivitas belanja modal. Belanja modal yang efektif seharusnya memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan kapasitas produksi, kelancaran distribusi, dan penciptaan lebih banyak kesempatan kerja. Selain itu, belanja modal yang efektif seharusnya juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas layanan publik. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial, pemerintah daerah harus mengarahkan belanja modal ke investasi produktif yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi setiap daerah.

Peningkatan belanja modal belum sepenuhnya menghasilkan dampak ekonomi yang optimal karena dipengaruhi oleh inefisiensi alokasi, lemahnya keterkaitan dengan sektor produktif, dan *time lag* pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan perlu bergeser dari orientasi peningkatan nominal belanja menuju peningkatan kualitas dan produktivitasnya. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi keberfungsian dan kontribusi aset terhadap aktivitas ekonomi, memastikan pembangunan baru berbasis kebutuhan dan manfaat ekonomi terukur, terutama pada sentra produksi, distribusi, dan sektor unggulan, serta memperkuat pemeliharaan aset untuk menjamin keberlanjutan manfaat investasi.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji F memperlihatkan bahwa PAD, TKDD, dan belanja modal semuanya memiliki pengaruh terhadap PDRB secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa pola pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017 hingga 2024 dapat dijelaskan oleh ketiga instrumen fiskal ini secara bersama-sama.

Dari perspektif desentralisasi fiskal, sinergi antara kapasitas pendapatan daerah, dukungan keuangan dari pemerintah pusat, serta pengelolaan belanja modal yang optimal dapat membentuk struktur fiskal daerah yang kuat dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan. Di sisi lain, dalam kerangka teori Keynesian *multiplier effect*, interaksi antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah berpotensi mendorong permintaan agregat, sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Jika pengeluaran pemerintah, terutama belanja modal, diarahkan ke sektor-sektor produktif, efek pengganda akan tercipta melalui peningkatan konsumsi, produksi, peluang kerja, dan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya kapasitas fiskal, namun juga oleh efektivitas pengelolaannya.

Secara keseluruhan, hasil uji simultan menunjukkan adanya kontribusi yang signifikan dari PAD, TKDD, dan belanja modal pada PDRB Sulawesi Tengah, meskipun belanja modal secara parsial menunjukkan efek negatif. Hasil ini menguatkan bahwa kebijakan fiskal merupakan faktor strategis dalam merangsang pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah, meskipun kontribusi masing-masing komponen fiskal tidak selalu sejalan satu dengan lainnya.

Penguatan PAD, optimalisasi TKDD, dan peningkatan kualitas belanja modal perlu dilakukan secara bersamaan dan terkoordinir sesuai karakteristik masing masing

daerah. PAD diarahkan pada perluasan basis penerimaan dari aktivitas ekonomi produktif, TKDD pada program yang berdampak ekonomi terukur, dan belanja modal pada peningkatan produktivitas aset serta penguatan sektor unggulan. Sinergi ketiganya diharapkan mampu mengubah kapasitas fiskal menjadi pertumbuhan ekonomi yang produktif dan inklusif, menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta mempersempit ketimpangan pertumbuhan antarwilayah di Sulawesi Tengah.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam rentang waktu 2017–2024, pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tengah terbukti dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Hasil ini menekankan peran penting kapasitas fiskal daerah dalam merangsang aktivitas ekonomi. Tingkat ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah pusat tercermin dalam TKDD, yang merupakan variabel paling dominan. Dengan demikian, kualitas pengelolaan dana TKDD menjadi penting untuk diperhatikan. Di sisi lain, belanja modal berpengaruh signifikan namun negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini diduga disebabkan karena struktur belanja modal yang lebih berfokus pada aset berjangka panjang belum mampu memberikan kontribusi optimal dalam jangka pendek. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyesuaian alokasi belanja modal dengan menitikberatkan pada investasi produktif yang memberikan dampak nyata dalam jangka pendek dan menengah. Dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang adil serta berkesinambungan di Provinsi Sulawesi Tengah, hasil keseluruhan penelitian ini mendukung pentingnya sinergi antara PAD, TKDD, dan belanja modal dalam kebijakan fiskal yang terintegrasi.

Peneliti sadar bahwa masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, diantaranya hanya mencakup data dari tahun 2017 hingga 2024 dan hanya berfokus pada beberapa variabel fiskal tanpa mempertimbangkan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, diperlukan penelitian tambahan yang menambahkan lebih banyak variabel agar temuan dapat digeneralisasikan secara lebih luas dan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

REFERENSI

- Aditya, J. R., Sudrajat, G. A., & Pringgodani, M. G. (2024). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Belanja Modal Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus pada Kabupaten Sampang Tahun 2013-2022. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(2), 160–179. <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i2.530>
- Ariyanti, A. D. (2023, September 14). Kebijakan Fiskal Daerah dalam rangka Pemerataan dan Kemandirian Pemerintahan Daerah. Diambil kembali dari <https://setkab.go.id/kebijakan-fiskal-daerah-dalam-rangka-pemerataan-dan-kemandirian-pemerintahan-daerah/>

- Bernardin, D. E., Agustin, W. D., & Fitria, Y. Z. (2023). Kinerja Keuangan Daerah: Penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah). *Jurnal Financia*, 4(2), 92-103. Diambil kembali dari <http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/financia>
- BPS. (2024). Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten_Kota di Provinsi Sulawesi Tengah 2017-2024, Badan Pusat Statistik Sulawesi Tengah
- BPS. (2024). Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi 2017-2024. Badan Pusat Statistik
- BPS. (2024). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Penajam Paser Utara Menurut Pengeluaran 2019-2023 (Vol. 12). CV. Rajawali Digital Printing and Offset.
- Deslina. (2024, Januari 26). Implementasi Desentralisasi Fiskal Berdasarkan Uu No. 1 Tahun 2022. Diambil kembali dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sijunjung/id/data-publikasi/artikel/3126-implementasi-desentralisasi-fiskal-berdasarkan-uu-no-1-tahun-2022.html>
- Fauji, Z., & Syafitri, W. (2024). The impact of local governance and regional own-source revenue on economic growth at the district level in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 27(2), 153–174.
- Fifiyanti Y, M. S. (2025). Pengaruh PAD, Belanja Modal dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(9), 53-60.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics Fifth Edition*. Douglas Reiner.
- Haryati, D. C., Nurpiji, Masitoh, G., Saputra, W., & Subarkah, T. (2025). Analisis Efisiensi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia : Pendekatan Data Panel. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(3), 139–153. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i3.2185>
- Hasanah P.H, A. M. (2026). Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 3(3), 1005-1015.e
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest and money*. Macmillan and Co., Limited. Diambil kembali dari <https://ia601508.us.archive.org/11/items/in.ernet.dli.2015.50092/2015.50092.The-General-Theory-Of-Employment-Interest-And-Money.pdf>
- Kirana, G., & Susilo. (2024). Analisis Pengaruh Belanja Modal, Penyertaan Modal, Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(4), 1115–1125. <https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.4.11>
- Kurniawati, & Muzdalifah. (2022). Pengaruh PAD dan DAU Melalui Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan (Periode 2011-2018). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(1), 16–28.
- Laodini, A., Rorong, I. P. F., & Tumangkeng, S. Y. L. (2023). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara Periode 2010 – 2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(6), 217–228.

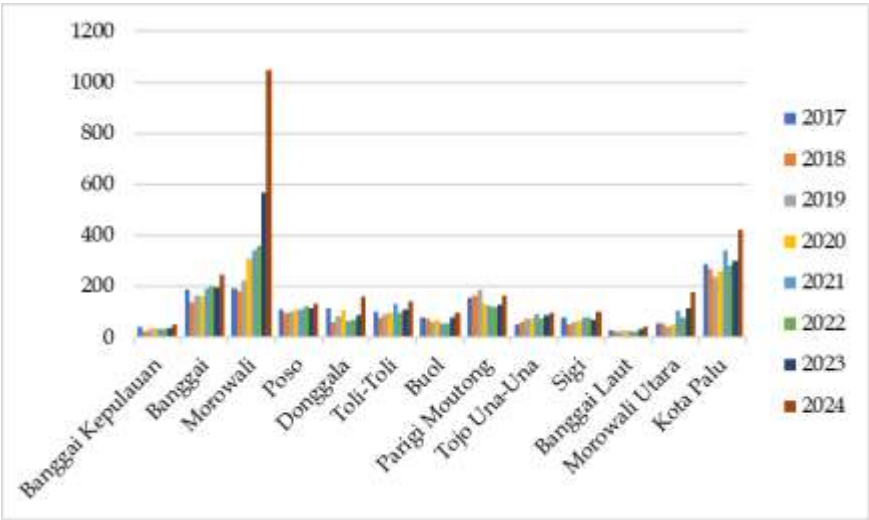
- Nurlaili, M. Y. S. E. (2022). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 6(2), 178–187.
- Nurmala, B., Harsono, I., Sutanto, H., Astuti, E., & Yuniarti, T. (2025). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Transfer, Dan Belanja Modal Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024 [The Influence Of Regional Original Revenue (PAD), Transfer Funds, And Capital Expenditure On Economic Growth Rate In West Nusa Tenggara Province For The Period 2015-2024]*. 19(3), 869–879. <https://jurnal.yalamqa.com/index.php/gara>
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich. Diambil kembali dari <https://archive.org/details/fiscalfederalism0000oate>
- Putra, H. N., Pratiwi, L. I., Al-Sakinah, P. S., & Safari, M. D. E. T. (2024). Pengaruh PAD, TKDD Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jombang. *Economic and Business Management International Journa*, 6(2), 279–284. <https://doi.org/10.556442>
- Rahman, A. G., Dai, S. I. S., & Santoso, I. R. (2022). Pengaruh Dana Transfer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Wilayah Sulawesi). *EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 22(2), 64–74. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.9122>
- Saputra, M. R., Haliah, & Indrijawati, A. (2021). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 129–134. <https://doi.org/10.26487/akrual.v14i2.14810>
- Simamora, S. E., Marbun, D. P. S. B., Zahra, F. H., Asnidar, A., & Ridha, A. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(4), 394–416. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i4.2660>
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo, Ed.; 2nd ed.). Alfabeta. www.cvalfabeta.com
- Sulaeman, A. S., & Silvia, V. (2019). Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, Dan Belanja Modal, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Di Indonesia. *Jurnal Acitya Ardana*, 4(1), 97–112.
- Tana, A. A., Kalangi, L., & Wokas, H. R. N. (2024). Analysis of Transfer Funds on Regional Expenditure of North Sulawesi Provincial Government Before and During Covid-19 Pandemic. *Accounting and Finance Studies*, 4(1), 34–52. <https://doi.org/10.47153/afs41.8852024>
- Yuliana, E. S., Kurniasih, N., & Mahyus. (2025). Transfers to Region on Economic Growth During The Covid-19 Pandemic. *Journal of Social Science*, 4(1), 12–21. <https://joss.al-makkipublisher.com/index.php/js>
- Zein, M. H. M., Muhtarom, M., Mulyadi, M., & Septiani, S. (2024). Examining the Role of Local Government's Financial Performance and Capital Expenditure in Increasing Economic Growth in Banten Province, Indonesia (2018–2022). *Journal of Risk and Financial Management*, 17(10). <https://doi.org/10.3390/jrfm17100456>

LAMPIRAN

Tabel 4. Hasil Estimasi Regresi

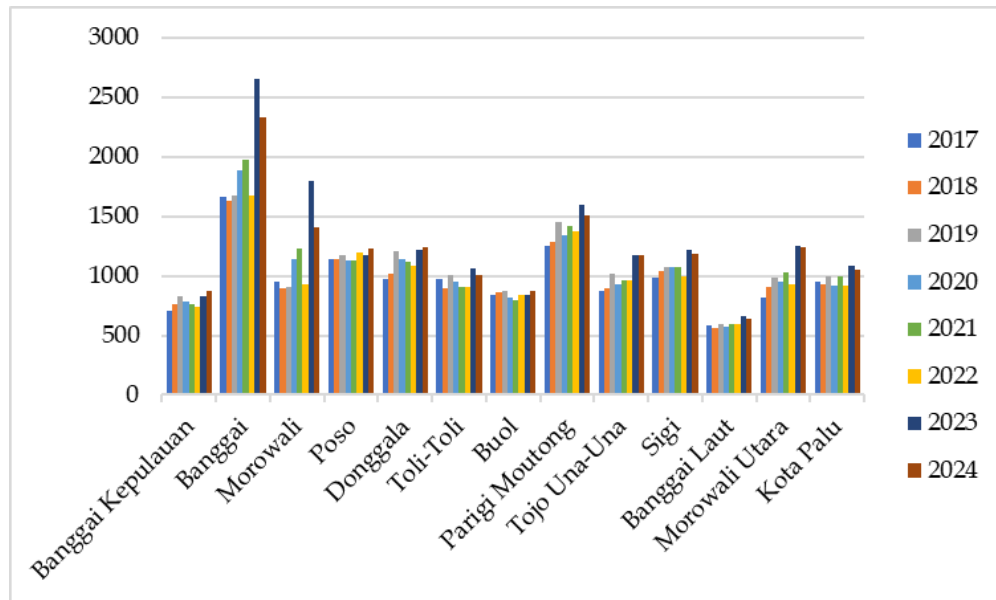
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.777959	0.942448	1.886534	0.0625
LNPAD	0.344861	0.062679	5.501998	0.0000
LNTKDD	0.882774	0.162268	5.440213	0.0000
LNBM	-0.104265	0.051233	-2.035097	0.0448
R-squared	0.979502			
Adjusted R-squared	0.976009			
Prob(F-statistic)	280.3462			

Sumber: Hasil Output E-Views 12 (telah diolah), 2025



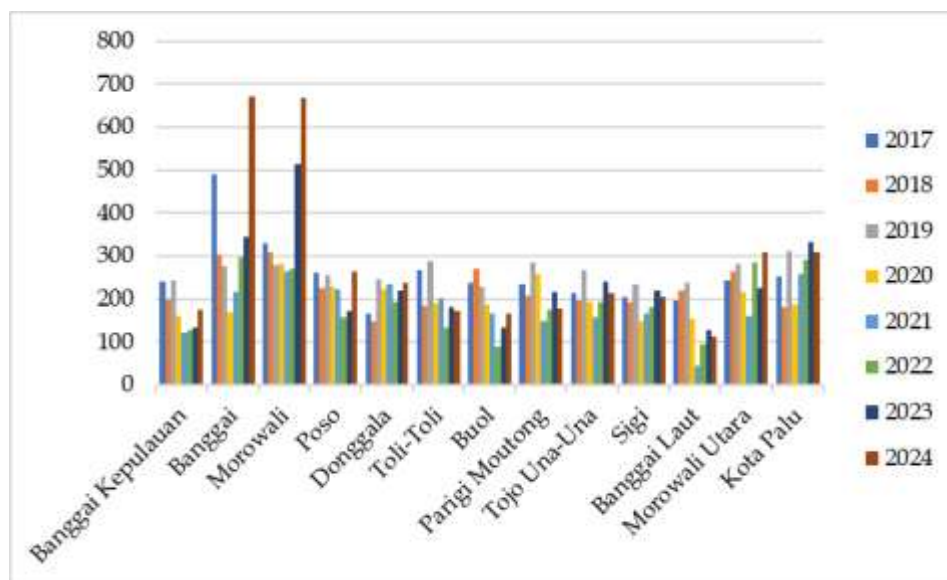
Sumber: DJPK Kemenkeu (telah diolah), 2025

Gambar 4. Realisasi PAD Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2017-2024 (Miliar Rupiah)

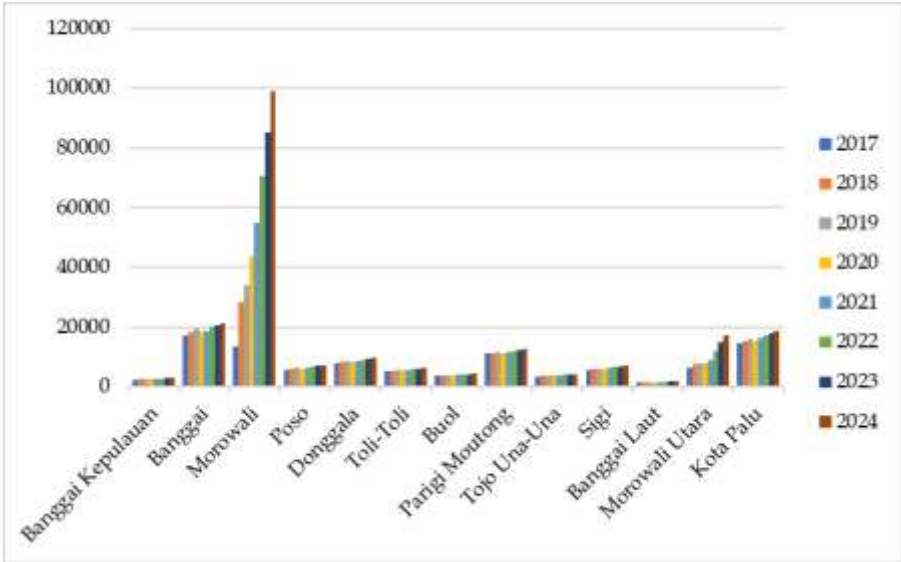


Sumber: DJPK Kemenkeu (telah diolah), 2025

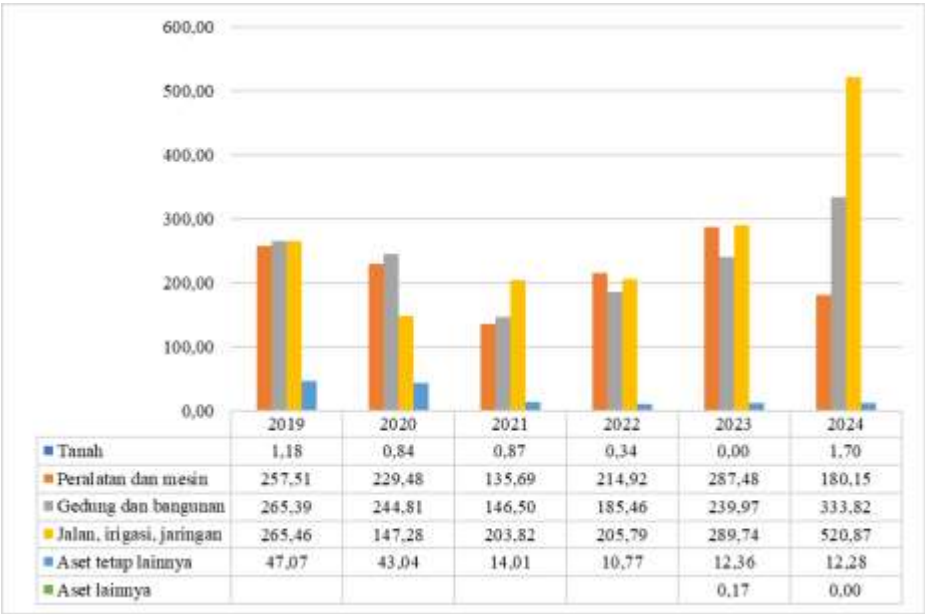
Gambar 5. Realisasi TKDD Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2017-2024 (Miliar Rupiah)



Gambar 6. Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2017-2024 (Miliar Rupiah)



Gambar 7. PDRB Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2017-2024 (Miliar Rupiah)



Sumber: CaLK Sulawesi Tengah (telah diolah), 2025

Gambar 8. Rincian Realisasi Belanja Modal Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2024 (Miliar Rupiah)

Jenis Belanja Modal	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah	0,14%	0,13%	0,04%	0,06%	0,00%	0,16%
Peralatan dan mesin	30,78%	34,48%	27,13%	34,82%	34,65%	17,18%
Gedung dan bangunan	31,72%	36,79%	29,29%	30,04%	28,92%	31,83%
Jalan, irigasi, jaringan	31,73%	22,13%	40,75%	33,34%	34,92%	49,67%
Aset tetap lainnya	5,63%	6,47%	2,80%	1,74%	1,49%	1,17%
Aset lainnya	0	0	0	0	0,02%	0,00%

Sumber: CaLK Sulawesi Tengah (telah diolah), 2025

Gambar 9. Persentase Realisasi Belanja Modal Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2024